

## **KETERIKATAN LAJU PERTUMBUHAN MASYARAKAT, TINGKAT TINGKAT PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KEMISKINAN DI INDONESIA**

*Wa Ode Nuraziza<sup>1</sup>, Hasana Rahim<sup>2</sup>, Windi Ayu Puspita<sup>3</sup>*

*LAIN Sultan Amai Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Indonesia<sup>1</sup>*

*LAIN Sultan Amai Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Indonesia<sup>2</sup>*

*LAIN Sultan Amai Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Indonesia<sup>3</sup>*

*Email: [Waodenuraziza0@gmail.com](mailto:Waodenuraziza0@gmail.com)<sup>1</sup>*

**Abstract:** *This study aims to analyze the influence of population growth, the formal unemployment rate (TPT), and the Human Development Index (HDI) on poverty levels in Indonesia in 2025. Using a quantitative associative approach, this research employs secondary data from Statistics Indonesia (BPS) covering 38 provinces and analyzes using IBM SPSS, the information was subjected to multivariate linear regression 25. Prior to estimation, classical assumption tests—including normality, multicollinearity, and heteroskedasticity tests—were conducted and confirmed that the regression model met all analytical requirements. The results show that population growth and the open unemployment rate have no substantial impact on poverty, while the Human Development Index has a negative and substantial impact, indicating that improvements in education, health, and purchasing power directly contribute to reducing poverty levels. Simultaneously, the three variables significantly influence poverty, with an R-square value of 0.688, explaining 68.8% of the variation in poverty across provinces. These findings underscore the pivotal role of human development in poverty reduction, highlighting that structural improvements in education and health yield more substantial impacts than demographic or labor market fluctuations alone. The study provides empirical evidence for policymakers to prioritize human capital investment as a long-term strategy for sustainable poverty alleviation, while also reinforcing theoretical perspectives that frame poverty as a multidimensional phenomenon influenced by more than just economic and social contexts." suffused with the essence of what constitutes culture: its difference -differentness. capability enhancement.*

**Keywords:** *“Poverty; Population Growth; Unemployment; Human Development Index; Indonesia;”*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan laju pertumbuhan masyarakat, tingkat tingkat pengangguran (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada jumlah penduduk kurang mampu di Indonesia pada tahun 2025. Dengan memakai metode penelitian menggunakan data yaitu kuantitatif asosiatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari pusat statistik yang mencakup 38 provinsi dan dianalisis memakai regresi linear berganda melalui IBM SPSS 25. Sebelum estimasi, diuji uji asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas yang seluruhnya menghasilkan bahwa model regresi memenuhi kriteria kelayakan analisis. Hasil penelitian menghasilkan bahwa laju pertumbuhan masyarakat dan tingkat tingkat pengangguran tidak mempunyai keterikatan kuat pada kemiskinan, sementara JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA keterikatan negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa penambahan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli berkontribusi langsung pada penurunan kemiskinan. Secara simultan, ketiga variabel mempunyai keterikatan kuat dengan nilai R-square sebesar 0,688, yang berarti 68,8% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh model. Temuan ini menegaskan pentingnya pembangunan manusia sebagai faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan, sekaligus menghasilkan bahwa penambahan kapabilitas sosial masyarakat mempunyai dampak yang lebih kuat dibandingkan fluktuasi demografis maupun pasar tenaga kerja. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah untuk memprioritaskan investasi pada pendidikan, kesehatan, dan penambahan daya beli sebagai strategi jangka panjang, serta menambah dan menampilkan literatur teori kemiskinan yang memandang kemiskinan sebagai fenomena multidimensional.*

**Kata Kunci:** *Kemiskinan; Laju pertumbuhan masyarakat; Pengangguran; Indeks Pembangunan Manusia; Indonesia*

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Meskipun tren kemiskinan cenderung menurun selama satu dekade terakhir, angka kemiskinan tetap berada pada kondisi yang mengkhawatirkan karena diketerikatan oleh dinamika penduduk, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi ketenagakerjaan. Laju pertumbuhan masyarakat yang terus meningkat dapat memberikan tekanan pada penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, dalam konteks Indonesia, penambahan jumlah penduduk produktif justru berkaitan dengan bonus demografi yang berpotensi menurunkan jumlah penduduk kurang mampu ketika penduduk usia produktif terserap secara optimal dalam aktivitas ekonomi. (Vol, 2019)

Selain itu, Tingkat Tingkat pengangguran (TPT) merupakan indikator penting untuk menilai keseimbangan antara umur matang bekerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Secara teori, meningkatnya pengangguran akan mengurangi hasil ekonomi rumah tangga sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. (Nurlaili et al., 2023) Namun, pola ketenagakerjaan di Indonesia yang masih didominasi oleh sektor informal membuat pengangguran tidak selalu memberikan dampak signifikan pada fluktuasi kemiskinan. Indikator lain yang mempunyai peran penting ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup dimensi pendidikan,

kesehatan, dan standar hidup. JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA yang tinggi mencerminkan kualitas SDM yang lebih baik, sehingga secara teoritis dapat meningkatkan produktivitas dan peluang keluar dari kemiskinan. (Penduduk, 2023)

Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti laju pertumbuhan masyarakat, pengangguran, dan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA memberikan kontribusi signifikan pada perubahan angka kemiskinan. Nurhasanah mendapatkan bahwa laju pertumbuhan masyarakat dan pengangguran memengaruhi kemiskinan secara simultan di Indonesia. (M. H. Fadhilah et al., 2023) Penelitian lain oleh Pratama menghasilkan bahwa JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA mempunyai hubungan negatif pada jumlah penduduk kurang mampu, di mana penambahan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA akan menurunkan jumlah penduduk miskin. (A. K. Prasetyoningrum et al., 2018) Fadhilah dan Sari juga mendapatkan bahwa pengangguran dan pembangunan manusia menjadi determinan utama kemiskinan pada tingkat provinsi. Namun demikian, hasil penelitian yang bervariasi menghasilkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut tidak selalu seragam, sehingga diperlukan kajian empiris terbaru memakai data nasional. (Budhijana, 2017)

Penelitian ini memakai data sekunder dari pusat statistik dan dihitung memakai regresi linear berganda melalui SPSS. Sesuai data hasil olahan, ditemukan bahwa laju pertumbuhan masyarakat mempunyai keterkaitan kuat pada kemiskinan, sementara TPT dan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA tidak mempunyai keterkaitan kuat. Temuan ini menarik karena menghasilkan bahwa dalam konteks Indonesia, bonus demografi memberikan dampak ekonomi yang cukup besar pada penurunan kemiskinan, sementara variabel pengangguran dan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA tidak menghasilkan variabilitas yang cukup untuk menjelaskan perubahan kemiskinan dalam jangka pendek. (Penduduk, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan laju pertumbuhan masyarakat, tingkat tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia pada kemiskinan di Indonesia dengan memakai metode penelitian menggunakan data yaitu kuantitatif. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menampilkan literatur empiris mengenai determinan kemiskinan di Indonesia serta menjadi dasar perumusan kebijakan tepat sasaran bagi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. (Budhijana, 2017)

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi Indonesia dan berbagai negara berkembang. Meskipun tren kemiskinan nasional menghasilkan penurunan dalam satu dekade terakhir, angka kemiskinan tetap berada pada tingkat yang mengkhawatirkan karena diketerikatani oleh dinamika ekonomi, ketenagakerjaan, serta kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya persoalan kekurangan hasil ekonomi, tetapi merupakan fenomena multidimensional yang mencakup keterbatasan jangkauan pada pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan kesempatan ekonomi yang memadai (Sen, 1999).

Laju pertumbuhan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika kemiskinan. Menurut teori transisi demografi, laju pertumbuhan masyarakat yang tinggi dapat memberikan tekanan pada pasar tenaga kerja, kebutuhan pangan, dan kapasitas penyediaan layanan publik (Todaro & Smith, 2020). Namun, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penambahan proporsi penduduk usia produktif dapat menjadi peluang bonus demografi apabila diikuti penambahan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja (Bloom & Williamson, 1998). Beberapa penelitian menghasilkan bahwa angka kelahiran yang didominasi angkatan kerja dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, selama ditemukan jangkauan pada pekerjaan produktif (Mason, 2001).

Faktor lain yang mempunyai peran penting ialah Tingkat Tingkat pengangguran (TPT). Secara teoretis, pengangguran berdampak langsung pada kemiskinan karena hilangnya sumber hasil ekonomi rumah tangga (Mankiw, 2021). Namun, di Indonesia, struktur pasar kerja yang didominasi sektor informal menyebabkan keterhubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu kuat (Lewis, 1954). Banyak tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal dengan hasil ekonomi rendah tetapi tidak tercatat sebagai penganggur, sehingga angka pengangguran tidak sepenuhnya menggambarkan kerentanan ekonomi masyarakat (BPS, 2024).

Selain laju pertumbuhan masyarakat dan pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi variabel penting dalam analisis kemiskinan. Menurut UNDP, pembangunan manusia mencakup penambahan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (UNDP, 2020). JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA yang tinggi menghasilkan kualitas SDM yang baik dan berpotensi memberikan kontribusi pada penambahan produktivitas serta kemampuan ekonomi masyarakat (Sen & Dreze, 2002). Studi-studi sebelumnya secara konsisten menghasilkan hubungan negatif antara JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA dan kemiskinan, di mana penambahan kualitas manusia berkontribusi langsung pada penurunan kemiskinan (Mukhtar et al., 2019).

Penelitian empiris di Indonesia menghasilkan temuan yang bervariasi. Beberapa penelitian mendapatkan bahwa laju pertumbuhan masyarakat dan pengangguran mempunyai keterkaitan kuat pada kemiskinan (S. Fadhilah & Nurhasanah, 2023), sementara penelitian lain menghasilkan bahwa JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA merupakan faktor paling konsisten dalam menurunkan kemiskinan. Variasi temuan tersebut menghasilkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian empiris terbaru memakai data terkini dan mencakup seluruh provinsi di Indonesia (M. Prasetyoningrum & others, 2018).

Selain faktor demografis dan sosial, dinamika kemiskinan di Indonesia juga diketerikatani oleh struktur ekonomi nasional yang masih memiliki tantangan berbagai tantangan. Ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan perdagangan informal, menyebabkan sebagian besar rumah tangga miskin mempunyai tingkat hasil ekonomi yang rentan pada gejolak ekonomi. Perubahan harga pangan, naiknya biaya kesehatan, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja menjadi faktor yang membuat rumah tangga sulit keluar dari jerat kemiskinan (World Bank, 2022). Di beberapa provinsi, ketimpangan antarwilayah juga memperburuk kondisi kemiskinan, karena daerah dengan jangkauan infrastruktur yang terbatas cenderung mengalami hambatan dalam distribusi barang, konektivitas tenaga kerja, dan investasi pembangunan.

Kemiskinan juga berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja, yang diketerikatani oleh minimnya keterampilan, rendahnya kualitas pendidikan, dan terbatasnya jangkauan pelatihan. Menurut laporan UNDP, negara dengan tingkat produktivitas

rendah cenderung mempunyai jumlah penduduk kurang mampu tinggi karena tenaga kerja tidak mampu bersaing dalam pasar kerja modern (UNDP, 2020). Karenanya, memahami faktor-faktor seperti laju pertumbuhan masyarakat, pengangguran, dan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA menjadi penting karena ketiga variabel tersebut merupakan indikator yang saling berkaitan dalam menjelaskan mengapa kemiskinan tetap bertahan dalam jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian menggunakan data yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel laju pertumbuhan masyarakat, tingkat pengangguran (TPI), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada jumlah penduduk kurang mampu di Indonesia pada tahun 2025. Data yang dipakai merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, yang meliputi data laju pertumbuhan masyarakat, TPI, IPM, dan persentase kemiskinan menurut provinsi di Indonesia.

Sampel dalam penelitian ini ialah seluruh provinsi di Indonesia sebanyak 38 provinsi (termasuk DOB baru). Karena seluruh provinsi dipakai dalam penelitian, maka teknik metode sampel yang dipakai ialah *sampling jenuh* (*census*), di mana seluruh anggota sampel dijadikan sampel.

Analisis data diuji dengan memakai perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25. Teknik analisis utama yang dipakai ialah regresi linear ganda, karena studi ini melibatkan beberapa variabel independen. Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria BLUE (*Pengukur Linear Tak Bias Terbaik*), yang mencakup:

1. Uji Normalitas, untuk memastikan data residual memiliki distribusi normal.
2. Melakukan uji multikolinearitas dengan memeriksa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan yang kuat di antara variabel independen.
3. Melaksanakan uji heteroskedastisitas, dengan memakai scatterplot untuk memastikan bahwa residual mempunyai varians yang konstan.
4. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, diuji analisis regresi linear berganda disertai:
  - a. Uji F, untuk menguji keterikatan variabel independen secara simultan, dan
  - b. Uji t, untuk menguji keterikatan masing-masing variabel independen secara parsial.

Adapun model regresi yang dipakai ialah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

di mana Y ialah jumlah penduduk kurang mampu, X<sub>1</sub> ialah laju pertumbuhan masyarakat, X<sub>2</sub> ialah tingkat pengangguran, X<sub>3</sub> ialah IPM,  $\alpha$  merupakan konstanta,  $\beta$  ialah koefisien regresi, dan  $\epsilon$  ialah error term.

Lokasi penelitian mencakup seluruh provinsi di Indonesia dengan sumber data didapatkan melalui portal resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Proses analisis dan pengolahan data diuji pada tahun 2025 memakai SPSS versi 25.

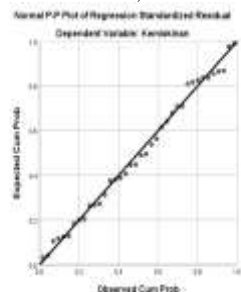
Penelitian ini memakai metode penelitian menggunakan data yaitu kuantitatif dengan fokus pada analisis hubungan antarvariabel memakai regresi linear berganda. Keunggulan metode penelitian menggunakan data yaitu kuantitatif terletak pada kemampuan menghasilkan temuan objektif sesuai data empiris yang terukur. Selain itu, penggunaan metode regresi linear berganda dipilih karena dapat mengukur besarnya keterikatan masing-masing variabel independen secara simultan maupun parsial pada variabel dependen (Gujarati, 2015). Data dianalisis memakai SPSS versi 25 dengan serangkaian pengujian asumsi klasik agar dapat memastikan bahwa model regresi memenuhi standar yang dibutuhkan akurasi dan keandalan.

Selain uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, penelitian ini juga melakukan evaluasi pada outlier memakai analisis scatter plot dan nilai *standardized residual*. Data dengan nilai residual di luar rentang  $\pm 3$  direkomendasikan untuk dievaluasi ulang agar model tidak bias (Ghozali, 2018). Penelitian ini juga memastikan bahwa hubungan antarvariabel telah memenuhi sifat linearitas melalui uji linearitas pada SPSS. Dengan demikian, seluruh tahapan analisis diuji secara sistematis untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara ilmiah.

HASIL PENELITIAN

1. Uji Normalitas

Gambar 1. Uji Normalitas



Sumber: Data dihitung, output SPSS

Uji normalitas residual diuji memakai Uji Kolmogorov–Smirnov menunjukkan nilai Sig, dengan hasil Asymp. (dua arah) sebesar 0,200, yang lebih tinggi dari 0,05. Hasil ini menghasilkan bahwa residual pada model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk memperkuat hasil tersebut, dapat dilihat Gambar 1, yaitu Normal P–P Plot of Regression Standardized Residual, yang menghasilkan bahwa nilai residual menyebar mengikuti garis diagonal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, model regresi dapat dipakai secara valid untuk analisis lebih lanjut.

Pada Gambar 1, titik-titik residual terlihat berada sangat dekat dengan garis diagonal, baik pada bagian awal, tengah, maupun akhir plot. Pola penyebaran yang demikian mengindikasikan bahwa tidak ditemukan penyimpangan berarti dari distribusi normal. Dukungan tambahan juga terlihat melalui scatterplot residual yang menghasilkan pola penyebaran titik yang stabil dan tidak menghasilkan outlier yang ekstrem. Dengan demikian, sesuai hasil uji statistik dan grafik pada Gambar 1, residual dinyatakan berdistribusi normal.

2. Tes Multikolinearitas

Multikolinearitas diuji dengan memeriksa nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji secara ringkas dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pertumbuhan ekonomi	0,861	1,161
TPT	0,841	1,189
IPM	0,743	1,347

Sumber: Data dihitung, Output SPSS

Uji multikolinearitas bertujuan menjamin bahwa tidak terdapat hubungan linier yang kuat antara variabel-variabel independen. Sesuai Tabel 1, semua variabel mempunyai nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, yang berarti tidak ada ditemukan indikasi multikolinearitas. Pertumbuhan ekonomi mempunyai Tolerance 0,861 dan VIF 1,161; TPT mempunyai Tolerance 0,841 dan VIF 1,189; sedangkan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA menghasilkan Tolerance 0,743 dan VIF 1,347. Nilai ini menghasilkan bahwa setiap variabel independen bekerja secara mandiri tanpa saling memengaruhi secara signifikan.

Dengan terpenuhinya batas kriteria pada Tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini berarti estimasi koefisien regresi dapat digambarkan secara lebih akurat dan stabil. Model yang bebas dari multikolinearitas menjamin bahwa masing-masing variabel mempunyai keterikatan tersendiri pada variabel dependen tanpa distorsi antar variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Pertumbuhan Ekonomi	0,754
TPT	0,174
IPM	0,752

Sumber: Data dihitung, output SPSS

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi memiliki varians residual yang konstan. Pengujian Hal ini diuji dengan meregresikan nilai residual absolut terhadap setiap variabel independen, dan hasil pengujian ditampilkan pada Tabel 2. Sesuai tabel tersebut, seluruh variabel mempunyai Tanda penting yang lebih tinggi daripada 0,05, yaitu pertumbuhan ekonomi (0,754), TPT (0,174), dan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA (0,752). Tanda penting yang ada di atas 0,05, menghasilkan bahwa tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara variabel

independen dengan nilai absolut residual.

Dengan demikian, Tabel 2 menghasilkan bahwa tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Varians residual dinyatakan homogen atau konstan di seluruh rentang data (homoskedastis). Kondisi ini mengindikasikan bahwa model memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas sehingga hasil estimasi regresi dapat dianggap reliabel, tidak bias, dan dapat dipakai untuk analisis lebih lanjut.

4. Uji Regresi Linear Berganda

a. Uji F (Bersama)

Hasil pengujian ANOVA menghasilkan nilai F sebesar 24,937 dengan nilai signifikansi 0,000, yang lebih rendah dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa secara bersamaan, variabel pertumbuhan ekonomi, TPT, dan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA mempunyai keterikatan kuat pada kemiskinan. Dengan demikian, model regresi yang dipakai mempunyai kelayakan signifikan untuk menjelaskan variabel dependen.

Nilai Sig. < 0,05 mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen secara bersamaan mempunyai keterikatan yang berarti pada jumlah penduduk kurang mampu di Indonesia. Dengan demikian, model regresi dinyatakan signifikan dan dapat dipakai sebagai alat analisis yang valid dalam melihat faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.

b. Uji t (Parsial)

Hasil uji t secara ringkas disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 3. Hasil Uji t**

Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
Pertumbuhan ekonomi	-1,346	-0,763	0,451	Tidak signifikan
TPT	0,612	1,235	0,225	Tidak signifikan
IPM	-1,127	-8,033	0,000	Signifikan

Sumber: Data dihitung, output SPSS

Uji t digunakan untuk memahami bagaimana setiap variabel independen terikat secara terpisah pada variabel dependen, yaitu jumlah penduduk kurang mampu. Ringkasan hasil uji t ditampilkan pada Tabel 3. Sesuai nilai signifikansi pada tabel tersebut, variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai Sig. sebesar 0,451 dan TPT sebesar 0,225, keduanya lebih besar dari 0,05. Hal ini menghasilkan bahwa baik pertumbuhan ekonomi maupun Tingkat pengangguran tidak mempunyai keterikatan kuat pada kemiskinan. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi pada kedua variabel tersebut belum mampu memberikan kontribusi statistik yang kuat dalam menjelaskan perubahan jumlah penduduk kurang mampu di Indonesia.

Sementara itu, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menghasilkan hasil yang berbeda. Nilai t yang dihitung adalah -8,033 dan nilainya Sig. sebesar 0,000, yang berada jauh di bawah batas signifikan 0,05, menghasilkan bahwa JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA berketerikatan negatif dan signifikan pada kemiskinan. Artinya, penambahan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA secara konsisten berkorelasi dengan penurunan jumlah penduduk kurang mampu. Korelasi negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, maka jumlah penduduk kurang mampu cenderung menurun secara signifikan.

c. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Coefficient of determination digunakan untuk menilai seberapa efektif variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R Square yang didapatkan ialah 0,688 yang berarti sebesar 68,8% perubahan jumlah penduduk kurang mampu dapat dilakukan melalui tiga variabel tersebut: pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM. Angka ini menghasilkan bahwa model regresi mempunyai kemampuan prediktif yang kuat karena lebih dari separuh variasi kemiskinan ketiga variabel ini dapat memberikan penjelasan.

Sementara itu, angka Adjusted R Square yaitu 0,660 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel dalam model, masih ditemukan 66,0% variasi kemiskinan yang variabel independen dapat memberikan penjelasan yang dipakai sisa yang ada, yaitu 31,2%, diketerikatani ditentukan oleh elemen lain yang tidak ada dalam model seperti inflasi, kualitas infrastruktur, kebijakan pemerintah, maupun faktor sosial ekonomi lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

d. Persamaan Regresi

Sesuai hasil perhitungan regresi linier berganda, didapatkan persamaan model sebagai berikut

$$Y = 93,274 - 1,346X_1 + 0,612X_2 - 1,127X_3$$

Koefisien regresi untuk pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) sebesar  $-1,346$  menghasilkan bahwa secara teoritis, setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan menurunkan jumlah penduduk kurang mampu sebesar 1,346%. Namun karena hasil uji t menghasilkan nilai yang tidak signifikan, maka keterikatan ini tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan praktis dalam model penelitian.

Koefisien regresi untuk TPT ( $X_2$ ) sebesar 0,612 berarti bahwa setiap kenaikan 1% tingkat tingkat pengangguran cenderung meningkatkan kemiskinan sebesar 0,612%. Namun, sama seperti variabel pertumbuhan ekonomi, keterikatan ini juga tidak signifikan secara statistik. Sebaliknya, variabel JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA ( $X_3$ ) mempunyai koefisien regresi  $-1,127$  yang signifikan. Artinya, setiap penambahan 1 poin JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA akan menurunkan jumlah penduduk kurang mampu sebesar 1,127% secara signifikan. Hal ini menghasilkan bahwa penambahan kualitas SDM merupakan faktor yang paling berketerikatan dalam menurunkan jumlah penduduk kurang mampu.

## PEMBAHASAN

### Keterikatan Pertumbuhan Ekonomi pada Kemiskinan

Hasil penelitian menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai koefisien negatif namun tidak signifikan pada jumlah penduduk kurang mampu. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu determinan utama penurunan kemiskinan, sebagaimana dijelaskan oleh Todaro dan Smith bahwa pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan ekonomi rakyat melalui menambah lowongan kerja dan perluasan kesempatan ekonomi (Todaro & Smith, 2020). Namun, temuan penelitian ini menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 belum cukup memberikan dampak langsung dalam menurunkan jumlah penduduk kurang mampu.

Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan distribusi kesejahteraan yang merata. Jika pertumbuhan lebih banyak terjadi pada sektor padat modal atau sektor yang cenderung tidak menyerap tenaga kerja, maka dampak pada penurunan kemiskinan menjadi terbatas (Suryahadi & Sumarto, 2003). Mukhtar et al. juga mendapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sering kali tidak signifikan pada penurunan kemiskinan akibat ketimpangan distribusi hasil pembangunan (Mukhtar & others, 2019).

Laporan World Bank mengutamakan bahwa pertumbuhan baru mampu mengurangi kemiskinan apabila bersifat inklusif, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan bagi kelompok berhasil ekonomi rendah dan memberi ruang penambahan produktivitas (World Bank, 2024). Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih memiliki tantangan tantangan berupa tingginya proporsi tenaga kerja informal, yang menyebabkan hasil pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh kelompok miskin.

Dengan demikian, ketidaksignifikanan keterikatan pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh adanya kesenjangan pembangunan, dominasi sektor informal, dan ketidakmerataan distribusi hasil ekonomi antarprovinsi.

### Keterikatan Tingkat Tingkat pengangguran (TPT) pada Kemiskinan

Temuan penelitian menghasilkan bahwa TPT mempunyai keterikatan positif namun tidak signifikan pada kemiskinan. Secara teoritis, penambahan pengangguran akan meningkatkan jumlah penduduk yang berisiko jatuh dalam kemiskinan akibat kehilangan hasil ekonomi (Mankiw, 2016). Namun, struktur ekonomi Indonesia menghasilkan bahwa sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor informal, bukan sektor formal yang rentan pada PHK.

Penelitian Nabibah & Hanifa menghasilkan bahwa TPT tidak selalu berkorelasi signifikan dengan kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin bekerja sebagai pekerja informal yang hasil ekonominya rendah tetapi tetap tergolong "bekerja", sehingga tidak tercatat sebagai penganggur (Nabibah & Hanifa, 2023). Hal ini menghasilkan bahwa pengangguran bukan satu-satunya faktor penentu kemiskinan, karena kemiskinan lebih erat terkait dengan rendahnya kualitas pekerjaan, bukan sekadar status bekerja atau tidak bekerja.

Data BPS juga melaporkan bahwa pekerja rentan (vulnerable employment) khususnya pekerja keluarga tidak dibayar dan pekerja sektor informal mengalami penambahan, menyebabkan hubungan antara pengangguran dan kemiskinan menjadi semakin lemah (Badan Pusat Statistik, 2024). Oleh karena itu, hasil penelitian yang menghasilkan ketidaksignifikanan hubungan TPT pada kemiskinan sejalan dengan dinamika ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak mencerminkan kualitas pekerjaan secara memadai.

Tingkat tingkat pengangguran tidak mempunyai keterikatan kuat dalam penelitian ini, namun secara teori pengangguran dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, khususnya ketika tidak tersedia lapangan kerja produktif. Pasar tenaga kerja Indonesia yang didominasi sektor informal menyebabkan sebagian penduduk tetap bekerja tetapi berhasil ekonomi sangat rendah sehingga tidak tercatat sebagai penganggur. Hal ini menjelaskan mengapa tingkat tingkat pengangguran tidak mencerminkan tekanan ekonomi secara akurat, meskipun tetap berpotensi meningkatkan kerentanan rumah tangga pada kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2024).

### Keterikatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kemiskinan

Penelitian mendapatkan bahwa JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA berketerikatan negatif dan signifikan pada kemiskinan, menghasilkan bahwa penambahan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli mempunyai efek langsung pada kemampuan

masyarakat keluar dari kemiskinan. Hasil ini cocok dengan teori yang dikemukakan oleh Amartya Sen tentang pembangunan manusia, yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari hasil ekonomi tetapi dari kemampuan manusia (capabilities) untuk hidup sehat, produktif, dan berpendidikan (Sen, 1999).

United Nations Development Programme (UNDP) secara konsisten melaporkan bahwa penambahan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA meningkatkan peluang ekonomi masyarakat, memperbesar kapasitas produktif, serta memperbaiki kualitas hidup kelompok miskin (UNDP, 2020). Dalam konteks Indonesia, penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA mempunyai hubungan negatif signifikan pada kemiskinan, yang berarti penambahan kualitas SDM merupakan strategi efektif dalam pengentasan kemiskinan (Mukhtar & others, 2019).

Hasil penelitian ini menguatkan bukti empiris bahwa provinsi-provinsi dengan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA tinggi cenderung mempunyai jumlah penduduk kurang mampu rendah, karena penduduknya mempunyai jangkauan lebih baik pada pendidikan, kesehatan, dan hasil ekonomi layak. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi faktor kunci yang konsisten dalam mengurangi kemiskinan.

#### **Keterikatan Simultan Variabel Pertumbuhan Ekonomi, TPT, dan IPM**

Hasil uji F menghasilkan bahwa ketiga variabel secara bersamaan mempunyai keterikatan kuat pada kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor saja. Teori kemiskinan multidimensi yang diperkenalkan oleh Alkire & Foster menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kombinasi faktor kemampuan, kesempatan, pendidikan, kesehatan, dan kondisi struktural (Alkire & Foster, 2011).

BPS dan World Bank menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia masih sangat diketerikati oleh kualitas sumber daya manusia, kondisi ketenagakerjaan, serta jangkauan pada layanan publik (Badan Pusat Statistik, 2023). Karena itu, model regresi dalam penelitian ini yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, TPT, dan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA sudah sesuai dengan pendekatan multidimensional dalam studi kemiskinan.

#### **Kontribusi Model ( $R^2$ )**

Nilai  $R^2$  yang mencapai 0,688 menunjukkan bahwa 68,8% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh kombinasi pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM. Ini merupakan nilai yang kuat, menghasilkan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan faktor signifikan dalam menjelaskan dinamika kemiskinan antarprovinsi.

Penelitian terdahulu oleh Pratama dan Fadhillah menghasilkan bahwa variabel-variabel makro seperti IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi bisa memberikan penjelasan sebagian besar variasi kemiskinan di wilayah Indonesia (A. Prasetyoningrum & others, 2018). Dengan demikian, model penelitian ini semakin menguatkan literatur yang telah ada.

Nilai  $R^2$  yang tinggi menghasilkan bahwa model bisa memberikan penjelasan sebagian besar variasi kemiskinan di Indonesia. Namun, masih ditemukan aspek lain yang tidak termasuk dalam model namun memiliki peran penting seperti inflasi, kemiskinan struktural, infrastruktur, dan hasil ekonomi daerah. Faktor-faktor ini sering kali berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat menambah dan menampilkan analisis dalam penelitian lanjutan. Dengan demikian, meskipun model ini sudah cukup kuat, penelitian mendatang dapat memasukkan variabel tambahan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. (Ghozali, 2023).

#### **Dinamika Kemiskinan di Indonesia**

Kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang diketerikati oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi, aspek sosial, hingga kualitas sumber daya manusia. Meskipun angka kemiskinan menghasilkan penurunan dalam satu dekade terakhir, kondisi kemiskinan di beberapa provinsi masih bersifat struktural dan berkaitan erat dengan keterbatasan jangkauan pada pendidikan, layanan kesehatan, serta lapangan pekerjaan produktif. Rumah tangga miskin umumnya bekerja pada sektor informal dengan hasil ekonomi tidak stabil, sehingga sangat rentan pada perubahan harga kebutuhan pokok maupun guncangan ekonomi yang lebih besar (Badan Pusat Statistik, 2023). Kemiskinan juga diketerikati oleh ketimpangan wilayah. Provinsi yang mempunyai infrastruktur baik cenderung mempunyai angka kemiskinan rendah, sedangkan daerah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur menghasilkan jumlah penduduk kurang mampu tinggi karena keterbatasan jangkauan, kondisi geografis menantang, dan rendahnya investasi pembangunan (Bank, 2024). Ketimpangan wilayah ini menghasilkan bahwa pengentasan kemiskinan perlu berbasis pendekatan kewilayahan dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Dinamika kemiskinan di Indonesia diketerikati oleh struktur ekonomi yang tidak merata antarwilayah. Daerah-daerah dengan infrastruktur baik dan konektivitas tinggi cenderung mengalami penurunan kemiskinan lebih cepat dibandingkan daerah tertinggal. Selain itu, faktor eksternal seperti kenaikan harga pangan, bencana alam, dan ketidakstabilan ekonomi global juga memperburuk kondisi rumah tangga miskin. Ketidakmerataan ini mengindikasikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perlu mempertimbangkan konteks geografis dan kapasitas daerah dalam menyediakan layanan dasar (Bank, 2024).

#### **Peran Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan**

Upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan diuji melalui berbagai program perlindungan sosial dan penguatan pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan Program Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program Keluarga Harapan, subsidi BPJS bagi masyarakat miskin, serta bantuan tunai bersyarat yang ditujukan untuk menjaga daya beli dan kualitas hidup kelompok rumah tangga miskin (UNDP, 2020). Program-program tersebut tidak hanya membantu kebutuhan konsumsi, tetapi juga mendorong penambahan pendidikan dan kesehatan anak yang berasal dari dengan sumber daya terbatas. Selain itu, penambahan kualitas SDM diuji melalui pelatihan vokasi seperti Program Kartu Prakerja, penambahan mutu layanan pendidikan,

dan pemerataan jangkauan kesehatan. Metode ini sesuai dengan kerangka pembangunan manusia yang mengutamakan bahwa penambahan pendidikan, kesehatan, dan hasil ekonomi layak merupakan dasar bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020). Selain pembangunan manusia, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, layanan internet, dan sarana transportasi. Pembangunan infrastruktur ini penting karena membuka jangkauan ekonomi, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan konektivitas daerah yang sebelumnya terisolasi (World Bank, 2024).

#### **Implikasi Hasil Penelitian pada Kebijakan Publik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai keterikatan berpengaruh besar dalam menurunkan kemiskinan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa strategi pengentasan kemiskinan perlu dikhususkan pada penambahan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Penambahan pendidikan dapat memperluas peluang tenaga kerja untuk memasuki pekerjaan yang lebih produktif. Penambahan kesehatan memperkuat produktivitas tenaga kerja, mengurangi beban biaya kesehatan, dan mencegah kerentanan ekonomi rumah tangga. Penambahan standar hidup melalui menambah lowongan kerja layak juga berperan dalam memperkuat daya beli masyarakat. Hasil ini cocok dengan konsep pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen, bahwa pembangunan harus meningkatkan kapabilitas dasar manusia agar dapat hidup produktif dan bebas dari kemiskinan (Sen, 1999). Dengan demikian, penambahan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA merupakan strategi yang paling efektif dan konsisten dalam mendorong penurunan kemiskinan antarprovinsi.

Implikasi hasil penelitian menegaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan harus berorientasi pada penambahan kualitas manusia dan menambah lowongan kerja berkualitas. Temuan mengenai dominannya keterikatan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA pada kemiskinan memberikan dasar kuat bagi pemerintah untuk memperluas pembangunan manusia melalui pendidikan berkualitas, reformasi layanan kesehatan, dan tenaga kerja yang kompetitif. Kebijakan publik yang terintegrasi dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan mempercepat penurunan kemiskinan nasional.

#### **Tantangan Pengentasan Kemiskinan ke Depan**

Pengentasan kemiskinan di Indonesia masih memiliki tantangan berbagai tantangan, salah satunya ialah ketimpangan antarwilayah yang menyebabkan jangkauan pada pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tidak merata. Tantangan lainnya ialah tingginya jumlah pekerja informal yang mempunyai hasil ekonomi rendah dan tidak mendapat perlindungan ketenagakerjaan memadai. Selain itu, transformasi ekonomi digital juga menimbulkan kesenjangan baru karena sebagian tenaga kerja belum mempunyai keterampilan digital yang dibutuhkan pasar kerja modern. Indonesia juga masih rentan pada guncangan ekonomi, sebagaimana terlihat saat pandemi COVID-19, di mana banyak rumah tangga rentan mengalami penurunan hasil ekonomi signifikan (Badan Pusat Statistik, 2024). Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mengutamakan pembangunan manusia, pemerataan pembangunan ekonomi, serta penambahan jangkauan masyarakat pada layanan dasar dan teknologi.

#### **KESIMPULAN**

Sesuai hasil uji dan identifikasi regresi linear berganda pada data 38 provinsi di Indonesia tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, laju pertumbuhan masyarakat mempunyai koefisien negatif namun tidak signifikan pada jumlah penduduk kurang mampu. Hal ini menghasilkan bahwa penambahan jumlah penduduk, khususnya penduduk usia produktif, belum memberikan keterikatan langsung pada penurunan kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Kedua, tingkat tingkat pengangguran (TPT) berketerikatan positif tetapi tidak signifikan pada kemiskinan. Temuan ini mencerminkan bahwa kondisi pasar kerja Indonesia yang didominasi oleh sektor informal membuat pengangguran tidak selalu menjadi faktor utama penentu kemiskinan. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berketerikatan berdampak buruk dan signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup mempunyai kontribusi nyata dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.

Secara simultan, laju pertumbuhan masyarakat, TPT, dan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA mempunyai keterikatan kuat pada kemiskinan, yang menghasilkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang diketerikatani oleh faktor ekonomi, ketenagakerjaan, dan kualitas sumber daya manusia. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,660 menandakan bahwa model bisa memberikan penjelasan 66,0% variasi kemiskinan antar provinsi di Indonesia. Dengan demikian, pembangunan manusia menjadi faktor yang paling konsisten dan signifikan dalam memketerikatani jumlah penduduk kurang mampu di Indonesia.

#### **SARAN**

Sesuai hasil penelitian, ditemukan beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang dikhususkan pada penambahan kualitas SDM melalui pemerataan jangkauan pendidikan, penambahan layanan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi. Hal ini penting mengingat JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA merupakan variabel yang mempunyai keterikatan paling kuat dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Kedua, penguatan sektor ketenagakerjaan perlu diuji melalui menambah lowongan kerja yang produktif, penambahan kualitas tenaga kerja, dan perluasan lapangan pekerjaan terutama di daerah dengan jumlah penduduk kurang mampu tinggi.

Ketiga, untuk penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel tambahan seperti belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi sektoral, upah minimum, atau tingkat inflasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luastentang elemen-elemen yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Penelitian ini juga dapat memakai data panel beberapa tahun ke depan untuk memberikan analisis yang lebih akurat pada dinamika kemiskinan di Indonesia.

---

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia*.
- Bank, W. (2024). *Indonesia Poverty and Equity Brief*. <https://documents1.worldbank.org>
- Bloom, D., & Williamson, J. (1998). Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia. *World Bank Economic Review*.
- BPS. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2024*.
- Budhijana, R. B. (2017). *Analisis Keterikatan Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA) dan Pengangguran Pada Jumlah penduduk kurang mampu Di Indonesia Tahun 2000 - 2017*. 8114.
- Fadhilah, M. H., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). *Keterikatan Jumlah Penduduk, Tingkat Tingkat pengangguran, dan Pendidikan Pada Kemiskinan di*. 5, 1–18.
- Fadhilah, S., & Nurhasanah. (2023). Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan. *Jurnal Nasional Ekonomi*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2023). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. UNDIP Press.
- Gujarati, D. N. (2015). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
- Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics*. Worth Publishers.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage.
- Mason, A. (2001). Population Change and Economic Development. *Asia-Pacific Population Journal*.
- Mukhtar, R., & others. (2019). *Human Development and Poverty in Indonesia*.
- Mukhtar, Saptono, & Arifin. (2019). Keterikatan JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA pada Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Nabibah, S., & Hanifa, N. (2023). Keterikatan Pengangguran pada Kemiskinan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Nurlaili, A., Wardani, K., & Pasya, D. J. (2023). *Keterikatan indeks pembangunan manusia (ipm) pada jumlah penduduk kurang mampu di provinsi lampung*. 6–11.
- Penduduk, P. J. (2023). 2023. 3, 29–41.
- Prasetyoningrum, A. K., Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). *Analisis Keterikatan Indeks Pembangunan Manusia (JUMLAH PEMBANGUNAN MANUSIA), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Pada Kemiskinan di Indonesia*. 6, 217–240.
- Prasetyoningrum, A., & others. (2018). Determinan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Prasetyoningrum, M., & others. (2018). *Human Development and Poverty in Indonesia*.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sen, A., & Dreze, J. (2002). *India: Development and Participation*. Oxford University Press.

Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2003). Poverty and vulnerability in Indonesia before and after the economic crisis. *Asian Economic Journal*.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson Education.

UNDP. (2020). *Human Development Report 2020*.

Vol, J. E. (2019). *THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX*. 2(2), 77–89.

World Bank. (2022). *Indonesia Poverty Assessment*.

World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Growth for All*.